



Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2019

Nimas Galuh Savitri¹, Ary Yunita Anggraeni²

^{1,2} D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

² ary.yunita@unmer.ac.id

Article history:

Received: 2021-01-01

Revised: 2021-01-20

Accepted: 2021-02-05

✉ Corresponding Author:

Name author: Maria Da Rosalina Yawa

E-mail:

Abstract

This study aims to prove whether the Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fees (BBNKB) have an effect on Regional Original Income (PAD) at the Regional Revenue Agency of East Java Province. The data used in this study are the realization of Motor Vehicle Tax (PKB) and the realization of Transfer of Names for Motor Vehicles (BBNKB) as well as the realization of Regional Original Income at the Regional Revenue Agency in East Java Province from 2013-2019. In this study the test model used was regression multiple linear. The result of this study is that the motor vehicle tax variable has a significant effect on regional original income and the transfer of motor vehicle title fees does not have a significant effect on regional original income.

Keywords: Keyword_1; Motor vehicle tax, Motor vehicle transfer fee, Regional original income, Regional tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan realisasi Transfer Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013- 2019. Dalam penelitian ini model uji yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Kata Kunci_1; Pajak Kendaraan Bermotor, Biaya Transfer Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

1. Pendahuluan

Berkaitan dengan pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18, dinyatakan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut pajak daerah (Karina dan Budiaraso, 2016). Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dari pendapatan daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (www.dipendajatim.go.id) pada tahun 2013 sampai dengan 2019 bahwa selama 7 tahun terakhir PKB mengalami peningkatan. Sedangkan BBNKB mengalami fluktuasi pada tahun 2015 dan 2017. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak beritikad baik untuk melunasi utang pajaknya dan masih banyak wajib pajak yang belum mendaftar ulang kendaraannya dan ada kebijakan pemutihan untuk pajak daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Nurfaumi Auliah (2018) yang menganalisis tentang pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Takalar periode 2014-2017 menunjukkan hasil bahwa pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah, bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang serta uraian di atas maka peneliti ingin menguji apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tersebut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Landasan Teori

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pajak

Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada hasil hitung perkalian dari dua unsur, yaitu:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan harga pasaran umum
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% paling tinggi sebesar 2%
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.
- 3) Untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0.5% dan paling tinggi 1%.
- 4) Untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0.1% dan paling tinggi 0.2%.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut:

DPP = Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x Bobot yang Ditetapkan

PKB Terutang = DPP x Tarif Pajak

Keterangan:

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

d. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

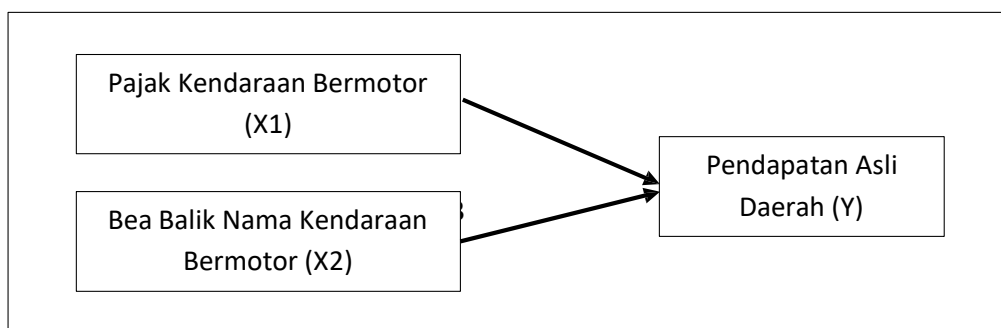
Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Dasar pengenaan pajak bea bermotor didasarkan pada hitungan unsur, yaitu nilai jual kendaraan bermotor.

Tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor:

- 1) Ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - (a) Penyerahan pertama sebesar 20%
 - (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
- 2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi, sebagai berikut:
 - (a) Penyerahan pertama sebesar 0.75%
 - (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0.075%
- 3) Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bea balik nama dihitung dengan cara sebagai berikut: Pajak BBNKB = DPP x Tarif Pajak

e. Perumusan Hipotesis



Gambar 1

Berdasarkan landasan teori maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah
- H₂ : Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah
- H₃ : Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah

3. Metode Penelitian

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah:

- 1) Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam suatu badan usaha.

Tabel 1
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Sumber	Satuan
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (X ₁)	Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor	Realisasi penerimaan PKB tahun 2013-2019	Rupiah
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X ₂)	Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukkan dalam suatu badan usaha	Realisasi penerimaan BBNKB tahun 2013-2019	Rupiah
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2013-2019	Rupiah

c. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada topik Akuntansi khususnya Perpajakan

d. Lokasi Penelitian

Data target dan realisasi pendapatan asli daerah diunduh dari website resmi Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur

e. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data jumlah realisasi penerimaan asli daerah, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2013-2019.

f. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS versi 25 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

4. Hasil Penelitian

a. Deskriptif Data

Data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 7 tahun (2013-2019) adalah sebagai berikut:

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi BBNKB	Realisasi PAD
2013	3.896.189.871.560	3.836.938.435.381	9.454.356.806.113
2014	4.309.074.694.585	4.064.726.227.300	11.587.554.464.622
2015	4.911.609.520.175	3.534.061.188.065	12.520.887.214.056
2016	5.300.947.249.143	3.710.574.601.900	12.979.389.384.368
2017	5.889.832.877.975	3.705.312.680.779	14.376.269.972.507
2018	6.448.692.325.911	4.089.296.812.767	15.088.755.704.409
2019	6.890.439.193.872	4.232.540.305.900	15.547.536.261.582

Sumber: <https://www.dipendajatim.go.id>

b. Analisis Data

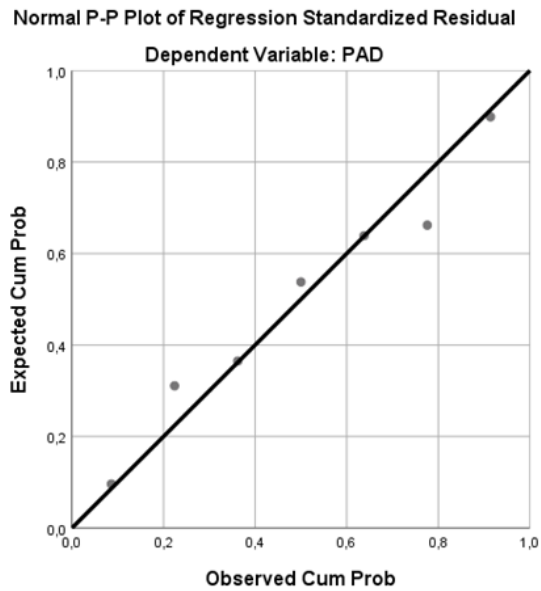
1) Statistik Deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKB	7	38961898715 60,00	68904391938 72,00	53781122476 02,9990	10998217241 97,02800
BBNKB	7	35340611880 65,00	42325403059 00,00	38819214645 84,5713	25263159704 6,08466
PAD	7	94543568061 13,00	15547536261 582,00	13053249972 522,4280	21433734971 21,36130
Valid N (listwise)	7				

Sumber : data diolah

2) Uji Normalitas



Gambar: Grafik Normal *Probability plot*

Tabel: Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0013951
	Std. Deviation	457260599359 269 80000
Most Extreme Differences	Absolute	,162
	Positive	,162
	Negative	-,130
Test Statistic		,162
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber data: data diolah

3) Uji Multikolonieritas

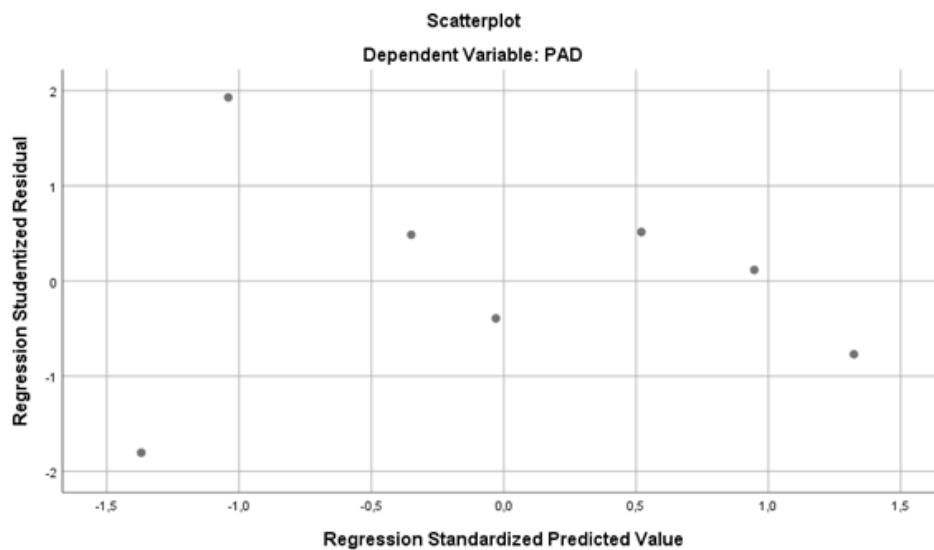
Tabel: Uji Asumsi Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	455315515	354382881		1,285	,268		
		1871,111	0673,826					
	PKB	1,951	,230	1,001	8,496	,001	,819	1,221
	BBNKB	-,513	1,000	-,061	-,514	,635	,819	1,221

a. Dependent Variable: PAD

Sumber data: data diolah

4) Uji Heterodastisitas



Gambar: Uji Heterokedastisitas grafik *Scatterplot*

Sumber: Data Diolah

5) Uji Autokorelasi

Tabel: Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,977 ^a	,954	,932	560027573954,70800	2,256

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber data: data diolah

6) Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	455315	354382		1,285	,268					
		515187	881067								
		1,111	3,826								
	PKB	1,951	,230	1,001	8,496	,001	,975	,973	,906	,819	1,221
	BBNK B	-,513	1,000	-,061	-,514	,635	,365	-,249	-,055	,819	1,221

a. Dependent Variable: PAD
Sumber data: data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil regresi berganda sehingga dapat dirumuskan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.553.155.151.871,11 + 1,951X_1 + (-0,531X_2) + e$$

7) Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,977 ^a	,954	,932	560027573954,70800

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber data: data diolah

8) Nilai Statistik t

Tabel Hasil Pengujian Hipotesis Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	455315515187	354382881067		1,285	,268
		1,111	3,826			
	PKB	1,951	,230	1,001	8,496	,001
	BBNK B	-,513	1,000	-,061	-,514	,635

a. Dependent Variable: PAD
Sumber data: data diolah

5. Pembahasan

a. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2019

Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai Sig $t < 0,001 < 0,05$. Hal ini merupakan meningkatnya penerimaan PKB menyebabkan kenaikan pada PAD. Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur juga diikuti dengan pertumbuhan penerimaan PKB, setiap tahun pemilik diwajibkan membayar PKB. Penerimaan PKB merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi PAD sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan PKB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD diterima.

b. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai Sig $t > 0,635 > 0,05$. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat Jawa Timur yang lebih memilih kendaraan baru sehingga jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan BBNKB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD tidak diterima.

c. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa PKB dan BBNKB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai Sig $t < 0,002 < 0,05$. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang menyebabkan kenaikan pada PAD. Dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan PKB dan BBNKB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

6. Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) PKB secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD, semakin pesat jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor maka mampu meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur pada 2013-2019.
- 2) Secara parsial BBNKB berpengaruh negatif terhadap PAD karena penerimaan BBNKB tergantung pada transaksi jual beli motor bekas, sehingga BBNKB tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD.
- 3) Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Jawa timur tahun 2013-2019, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya di provinsi Jawa Timur.

b. Saran

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan memperhatikan keterbatasan masalah dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil yang berbeda:

- 1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data saat kondisi Indonesia sedang terdampak pandemi Covid-19.
- 2) Diharapkan peneliti selanjutnya, menambah variabel lain atau melakukan analisis dengan variabel selain PKB dan BBNKB yang dapat mempengaruhi PAD.
- 3) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, dapat menggunakan objek penelitian pada Badan Pendapatan Daerah.

c. Keterbatasan

- 1) Data sekunder yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur hanya 7 tahun pengamatan saja yaitu dari 2013-2019, dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur.
- 2) Penelitian ini hanya menguji dua variabel independen dan satu variabel dependen, penelitian ini tidak memperhatikan informasi-informasi lain yang dapat mempengaruhi PAD.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Margaretha, Anton Arisman, dan Christina Yunita. 2016. Pengaruh Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Palembang*
- Aprliani, G. K. A., Josep, B. K., Jacline, I. S. 2019. Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 19. No 02
- Auliah, A., Nurfahmi. 2018. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Takalar. *Jurnal Riset Edisi XXVI*.
- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Homenta, P., Claudya & Afandi, Dhullo. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Indriani, Novi. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jawa Tengah: Universitas Semarang.
- Karina, N., & Budiarmo, N. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA*. Maret. Vol 4. No 1. 715-722
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit : Andi. Jakarta.
- Rakatitha, P. N. K., & Gayatri, G. 2017. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Bali. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol 21. No 2
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Rizal, Y., & Hidayah, M. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*. Januari. Vol 9. No 1
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Widhiyanti, Linda. 2018. Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung
- Zulfikar. 2016. *Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika*. Yogyakarta: Deepublish